



Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah

RAPIM B TAHAP VII

Kota Batam, 14-16 November 2024

Agenda

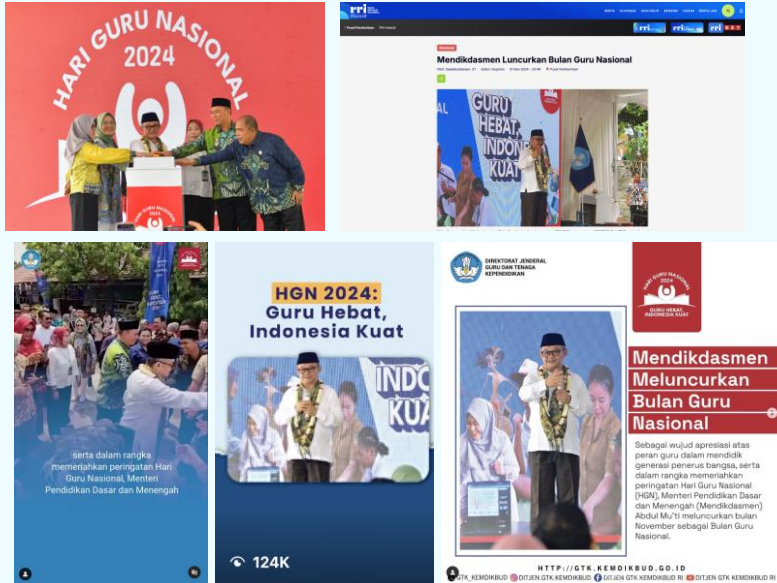
- 1 Tindak Lanjut Bulan Guru Nasional 2024
- 2 Seleksi Administrasi PPG bagi Guru Tertentu
- 3 Kinerja Anggaran TA 2024
- 4 Dukungan Quick Wins TA 2024
- 5 Kebijakan TA 2025
- 6 Isu-isu Lainnya



Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah

01 Tindak Lanjut Bulan Guru Nasional 2024

Peluncuran Bulan Guru Nasional



- Peluncuran sudah dilakukan saat kunjungan kerja di Palembang, 1 November 2024 bersamaan dengan kunjungan kerja perdana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
- Konten terkait peluncuran Bulan Guru Nasional juga diunggah di akun unit utama lain
- Total terdapat lebih dari 600 pemberitaan dan juga konten amplifikasi di media sosial hingga 14 November 2024

Sosialisasi Bulan Guru Nasional 2024



- Sosialisasi terkait Bulan Guru Nasional kepada BGP/BBGP telah dilakukan pada rapat SEPASI GTK
 - 21 Oktober 2024 (selesai)
 - 4 November 2024 (selesai)
 - 18 November 2024
- Panduan Penyelenggaraan dan Panduan Visual rangkaian Bulan Guru Nasional telah ditandatangani oleh Mendikdasmen.
- Surat edaran Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2024 telah terbit pada 12 November 2024.
- Panduan Penyelenggaraan dan Panduan Visual rangkaian Bulan Guru Nasional sudah dibagikan ke grup Publikasi Lintas Unit utama dan BGP/BBGP untuk segera ditindaklanjuti.

Publikasi Media Sosial: Cerita #GuruHebat



- Konten media sosial yang menunjukkan cerita guru-guru inspiratif dengan karya inovatif dan unik dalam menjawab tantangan pembelajaran dalam mendorong perubahan positif di sekolah.
- Publikasi #GuruHebat dilakukan sepanjang Bulan November 2024 di akun media sosial Ditjen GTK dan Kemendikdasmen.

Publikasi Media Sosial: Template Instagram



- Template Instagram Bulan Guru Nasional sudah diunggah di akun @ditjen.gtk.kemdikbud pada 13 November 2024
- Rencana akan diunggah template Instagram Bulan Guru Nasional selanjutnya pada:
 - 18 November 2024 (Cerita tentang guru saat sekolah dahulu yang menginspirasi dengan pesan “Pendidikan Bermutu untuk Semua”)
 - 22 November 2024 (Menuju HGN 25 November 2024 - Harapan untuk Guru Indonesia)
 - 28 November 2024 (Puncak HGN)

Publikasi Media Sosial: Capaian Lintas Direktorat

Menunjukkan rangkuman program-program Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan (PKB) di tiap direktorat GTK. Video masih dalam proses produksi.



baik dari para fasilitator yang luar biasa

Publikasi Media Sosial: Stiker / GIF di Instagram



- Stiker interaktif di media sosial sudah diunggah pada Giphy
- Stiker bisa digunakan di media sosial dengan kata kunci: “@ditjengtk”, “HGN” atau “**Hari Guru Nasional**”

Publikasi Media Massa



Menunjukkan kisah pengabdian dan karya-karya pembelajaran yang relevan dari guru-guru hebat Indonesia yang belum banyak dipublikasikan (1x per minggu)

Guru Hebat Melawan Berbagai Tantangan di Pedalaman

Setiap hari, ia memberikan motivasi kepada siswa agar aktif belajar. Ia mengutamakan siswa bahwa keterbatasan itu bukanlah alasan untuk membatasi diri untuk berkembang.

M. Ihsan A. Mawani
m.ihsan@indonesiaindonesia.com

Siswa guru hebat menaruh minat yang tinggi terhadap ilmu yang diajarkannya. Hal ini menunjukkan bahwa guru hebat memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi siswa. Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Selain itu, guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa, sehingga tercipta sinergi dalam mendukung proses pendidikan anak.

Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu, guru hebat juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, sehingga selalu siap menghadapi tantangan yang datang. Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berinovasi, sehingga selalu menawarkan cara baru dalam menyampaikan materi.

Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berempati, sehingga selalu memahami perasaan siswa. Selain itu, guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berkeadilan, sehingga selalu memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berprestasi, sehingga selalu berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan.

Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berketahanan, sehingga selalu siap menghadapi tantangan yang datang. Selain itu, guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berkeadilan, sehingga selalu memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berprestasi, sehingga selalu berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan.



Meretas Keterbatasan di Sekolah Terpencil

Sekelas sudah sebelum matahari menghangat di ufuk timur, Abdul Muhs telah memulai harinya. Dari Desa Eya tempat tinggalnya, ia mulai menyusuri jalan setapak, ladang, sungai, bukit-bukit hingga menuju SMP Terampil Eya, Kecamatan Palas, Kabupaten Pang. Mojang, Sulawesi Tengah.



Sekelas sudah sebelum matahari menghangat di ufuk timur, Abdul Muhs telah memulai harinya. Dari Desa Eya tempat tinggalnya, ia mulai menyusuri jalan setapak, ladang, sungai, bukit-bukit hingga menuju SMP Terampil Eya, Kecamatan Palas, Kabupaten Pang. Mojang, Sulawesi Tengah.



Sekelas sudah sebelum matahari menghangat di ufuk timur, Abdul Muhs telah memulai harinya. Dari Desa Eya tempat tinggalnya, ia mulai menyusuri jalan setapak, ladang, sungai, bukit-bukit hingga menuju SMP Terampil Eya, Kecamatan Palas, Kabupaten Pang. Mojang, Sulawesi Tengah.



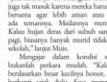
Jam bilangan



Jam bilangan



Jam bilangan



Jam bilangan



Jam bilangan



Jam bilangan

Siswa guru hebat menaruh minat yang tinggi terhadap ilmu yang diajarkannya. Hal ini menunjukkan bahwa guru hebat memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi siswa. Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk mengelola kelas dengan baik, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Selain itu, guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa, sehingga tercipta sinergi dalam mendukung proses pendidikan anak.

Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat, sehingga tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Selain itu, guru hebat juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, sehingga selalu siap menghadapi tantangan yang datang. Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berinovasi, sehingga selalu menawarkan cara baru dalam menyampaikan materi.

Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berempati, sehingga selalu memahami perasaan siswa. Selain itu, guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berkeadilan, sehingga selalu memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berprestasi, sehingga selalu berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan.

Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berketahanan, sehingga selalu siap menghadapi tantangan yang datang. Selain itu, guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berkeadilan, sehingga selalu memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Guru hebat juga memiliki kemampuan untuk berprestasi, sehingga selalu berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan.

Profil #GuruHebat di Media Indonesia
Terbit: 8 November 2024

Profil #GuruHebat di Kompas
Terbit: 14 November 2024



Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Materi Cetak (Amplifikasi Kemeriahan)

Banner dan baliho sudah naik di sekitaran kantor Kemendikdasmen Senayan, sejak 8 November 2024



Sapa GTK



Acara:

Hari/Tanggal : 20 November 2024
Waktu : 14.00 WIB
Lokasi :
- Ruang Podcast, Lt. 11 Gedung D, Kemendikdasmen

Tema:

Pendidikan Bermutu untuk Semua

Narasumber utama:

- Wamendikdasmen*
- Dirjen GTK - Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.

Narasumber Guru*:

- Kuswanto (Penerima Penghargaan Presiden Jokowi - Guru Dedikatif, Sulawesi Tenggara)
- Revol Malimpu (Penerima Penghargaan Guru Dedikatif 2023 - Papua Pegunungan)
- Guru PPG bagi Calon Guru di daerah

*Dalam Konfirmasi

Talkshow di iNews Media

Acara:

Hari/Tanggal : 22 November 2024 (*Recording*)
25 November 2024 (*Tayang*)
Lokasi : Studio iNews

Tema:

Guru Hebat, Indonesia Kuat

Narasumber utama:

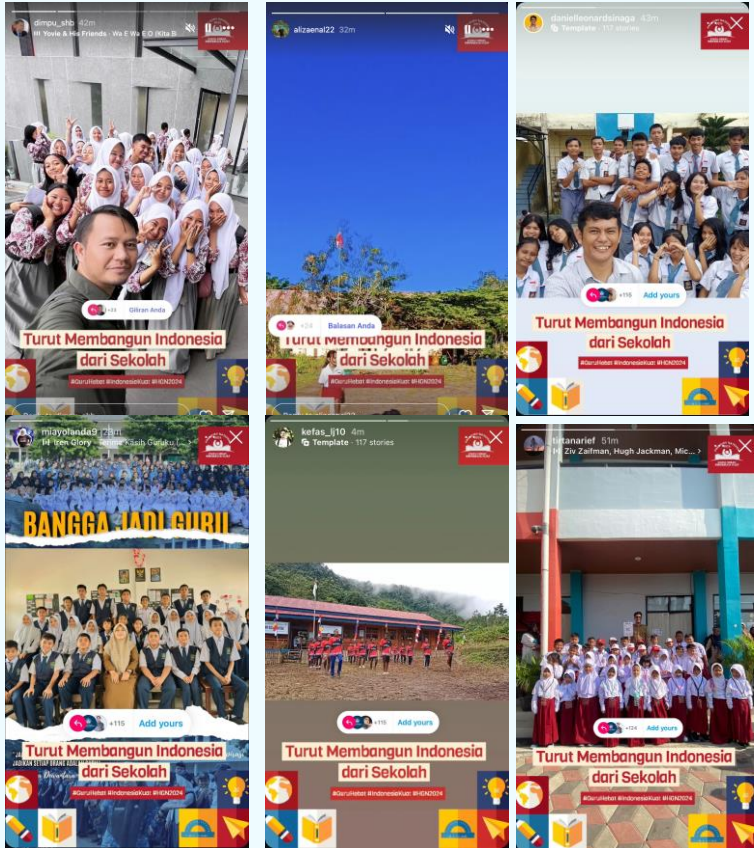
Dirjen GTK – Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.

Narasumber Guru*:

- Penerima penghargaan Jambore GTK Hebat 2024

*Dalam Konfirmasi

Pelibatan Komunitas



- Pelibatan komunitas guru dalam mendukung kampanye publik Bulan Guru Nasional, seperti:
 - Guru Konten Kreator (GKK)
 - Komunitas Kami Pengajar
 - Organisasi Profesi Guru
 - Dan Komunitas guru lainnya

Tindak Lanjut Untuk BBGP/BGP

- Memperingati dan merayakan Bulan Guru Nasional dengan cara sederhana, bermakna, dan membawa semangat positif bagi pendidikan Indonesia.
- Menyusun rangkaian kegiatan dalam Bulan Guru Nasional dengan melibatkan guru-guru di daerahnya masing-masing, seperti: Seminar, webinar, temu komunitas, dll.
- Melakukan sosialisasi Bulan Guru Nasional, baik pada Dinas Pendidikan dan sekolah.
- Melakukan publikasi seoptimal mungkin agar pemberitaan terkait Jambore GTK Hebat, Bulan Guru, dan Hari Guru Nasional menggema di daerah maupun nasional.
- Mendukung data profil guru-guru hebat yang dibutuhkan, baik untuk publikasi di daerah maupun nasional.
- Memfasilitasi proses dokumentasi profil guru-guru hebat di wilayah kerja masing-masing, untuk publikasi terkait Hari Guru Nasional.



Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah

02 Seleksi Administrasi PPG bagi Guru Tertentu



Penuntasan PPG Tertentu (Guru Dalam Jabatan)



Sumber: Dapodik Juni 2024 (tanpa mapel agama)



Jika diberikan afirmasi Kualifikasi S1 sebesar Rp3 Juta/semester, dibutuhkan alokasi anggaran Rp748,9 M/semester (total anggaran yang dibutuhkan **Rp5,9 Triliun** selama 8 semester).



INFORMASI TERKINI PELAKSANAAN PPG BAGI GURU TERTENTU

sampai dengan pengumuman kelulusan UKPPPG periode 3 tahun 2024

Tahap	Jumlah Peserta	UKPPPG	Kelulusan
Piloting 1	Jumlah Peserta (Konfirmasi Bersedia) 90.487	Mengikuti UKPPPG 89.964	Lulus 86.813
Piloting 2	Jumlah Peserta (Konfirmasi Bersedia) 211.068	Mengikuti UKPPPG 210.089	Lulus 202.345
Tahap 3	Jumlah Peserta (Konfirmasi Bersedia) 304.873	Terjadwal UKPPPG 16 - 21 November 2024	menunggu UKPPPG
Awan Penggerak	Jumlah Peserta (Konfirmasi Bersedia) 173	Belum UKPPPG	menunggu UKPPPG



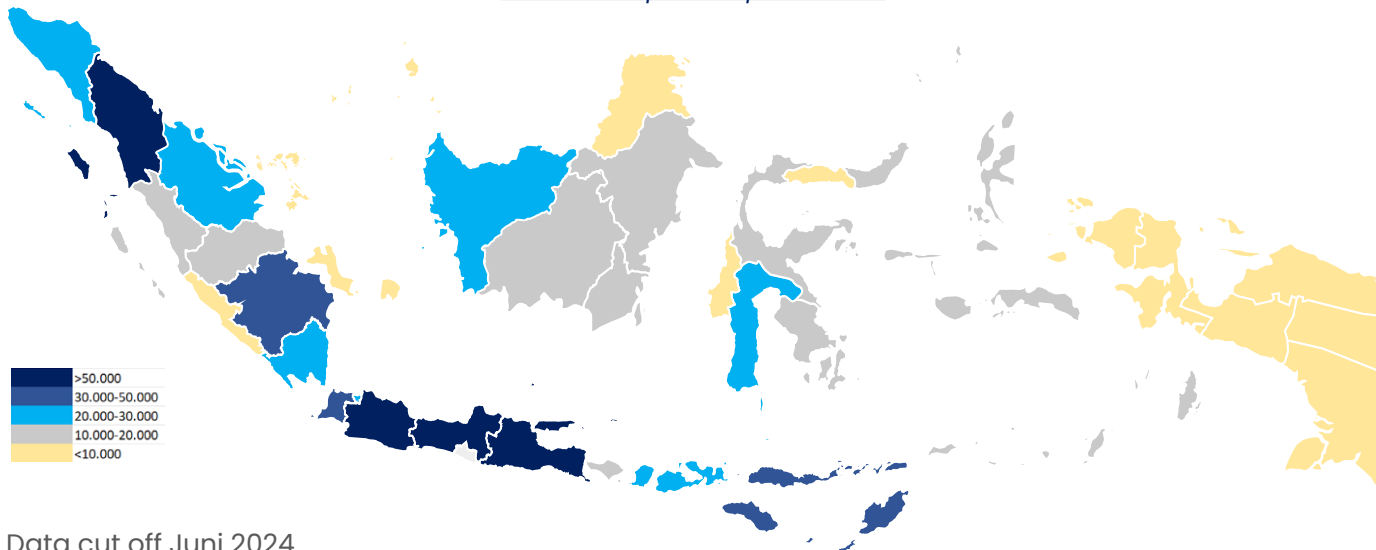
POTENSI PESERTA SELEKSI ADMINISTRASI PPG BAGI GURU TERTENTU TAHUN 2024

Rekap per Provinsi



Potensi Peserta
804.066

Persebaran peserta per Provinsi



Data cut off Juni 2024

No	Provinsi	Potensi Peserta
1	Jawa Barat	103.038
2	Jawa Timur	81.580
3	Jawa Tengah	54.880
4	Sumatera Utara	53.093
5	Nusa Tenggara Timur	35.580
6	Sumatera Selatan	31.497
7	Banten	30.195
8	Aceh	28.030
9	Sulawesi Selatan	27.707
10	Lampung	26.703
11	Nusa Tenggara Barat	26.468
12	Riau	26.091
13	DKI Jakarta	25.286
14	Kalimantan Barat	21.905
15	Sumatera Barat	19.888
16	Sulawesi Tenggara	17.470
17	Sulawesi Tengah	15.895
18	Jambi	15.240
19	Kalimantan Timur	14.804
20	Maluku	14.800
21	Kalimantan Tengah	13.920
22	Sulawesi Utara	12.499
23	Maluku Utara	12.469
24	Kalimantan Selatan	12.224
25	Bali	11.639
26	Bengkulu	9.480
27	DI Yogyakarta	9.285
28	Kepulauan Riau	7.788
29	Sulawesi Barat	7.488
30	Papua	5.708
31	Kep. Bangka Belitung	4.723
32	Gorontalo	4.355
33	Papua Tengah	4.333
34	Papua Barat Daya	4.084
35	Papua Barat	4.000
36	Kalimantan Utara	3.934
37	Papua Pegunungan	2.975
38	Papua Selatan	2.823
39	SILN	190
Total		804.066



PERSIAPAN CALON PESERTA SELEKSI ADMINISTRASI PPG BAGI GURU TERTENTU

Tahun 2024

Dalam rangka persiapan seleksi administrasi Bapak dan Ibu Guru Calon Peserta:

1

Guru aktif mengajar minimal 1 tahun pada tahun ajaran 2023/2024 dan tercatat pada dapodik atau kurang dari 1 (satu) tahun dengan pertimbangan memiliki riwayat mengajar tercatat pada dapodik pada tahun ajaran sebelum tahun ajaran 2023/2024;



2

Verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada laman <https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/>



3

Verifikasi Ijazah Sarjana Strata 1 (S1) atau Diploma IV (D-IV) pada laman <https://info.gtk.kemdikbud.go.id/>



4

Pemutakhiran pada dapodik terkait:

- status sebagai guru atau kepala sekolah aktif pada satuan pendidikan formal (jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB);
- terdaftar di 1 (satu) induk satuan pendidikan formal.





TIMELINE SELEKSI ADMINISTRASI PPG BAGI GURU TERTENTU TAHUN 2024

Rencana Linimasa Pelaksanaan

Minggu ke-3 November 2024

Persiapan Data dan Pengembangan Sistem Seleksi

- Data dan Sistem berisi:
 - a. Data Guru
 - b. Sistem Seleksi
- Melibatkan Pusdatin, Dapodik, Bagren Setditjen dan SIMPKB

Minggu ke-4 November 2024

Launching dan Sosialisasi

- Launching saat Hari Guru Nasional
- Sosialisasi kepada Stakeholders/UPT dan B/BGP

Minggu ke-4 November 2024
s.d. Minggu ke-4 Desember 2024

Pelaksanaan seleksi administrasi

- Pelaksanaan seleksi administrasi PPG bagi Guru tertentu



STRATEGI KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI

Seleksi Administrasi PPG Bagi Guru Tertentu

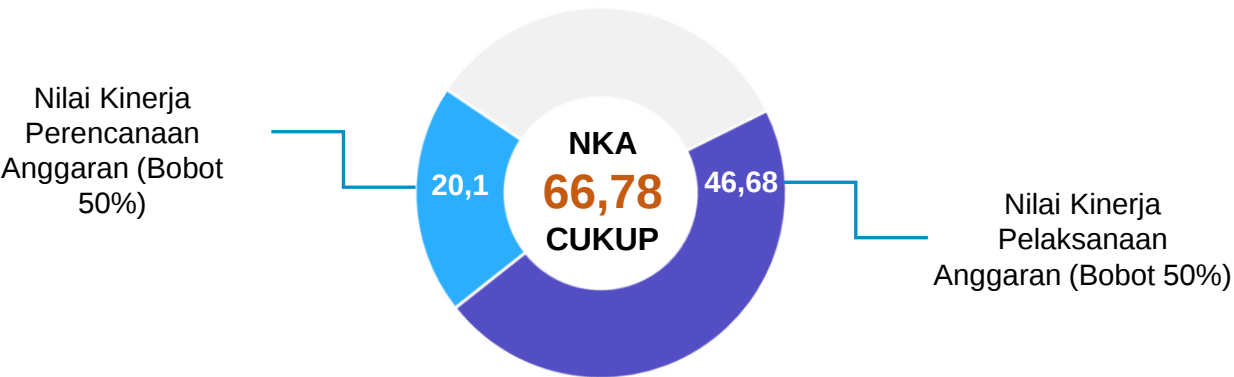
1. **Penyiapan paket informasi, akan disebarakan melalui Linktree/s.id:**
 - Panduan pelaksanaan
 - FAQ
 - Infografis/videografis
2. **Teaser persiapan seleksi administrasi di media sosial dan media massa (jika memungkinkan)**
3. **Koordinasi dengan BBGP/BGP dan Pemerintah Daerah**
4. **Webinar persiapan seleksi administrasi bagi guru sasaran peserta:**
 - Youtube
 - Live Instagram Dirjen GTK terkait seri pelaksanaan seleksi administrasi
 - IG Reels Dirjen GTK dan Plt. Direktur PPG
5. **Pusat Bantuan dan Saluran WA Direktorat PPG**
6. **Pelibatan komunitas dalam penyampaian informasi**



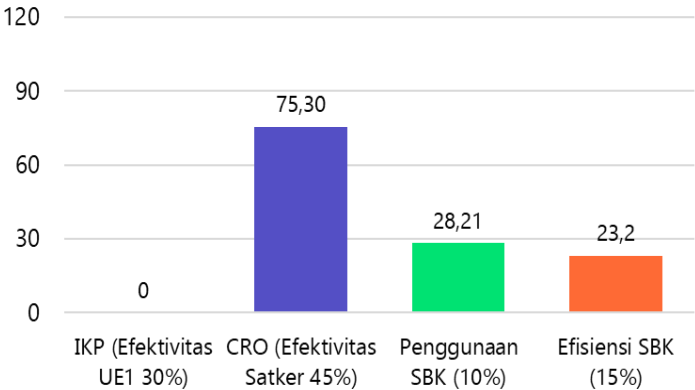
Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah

03 Kinerja Anggaran TA 2024

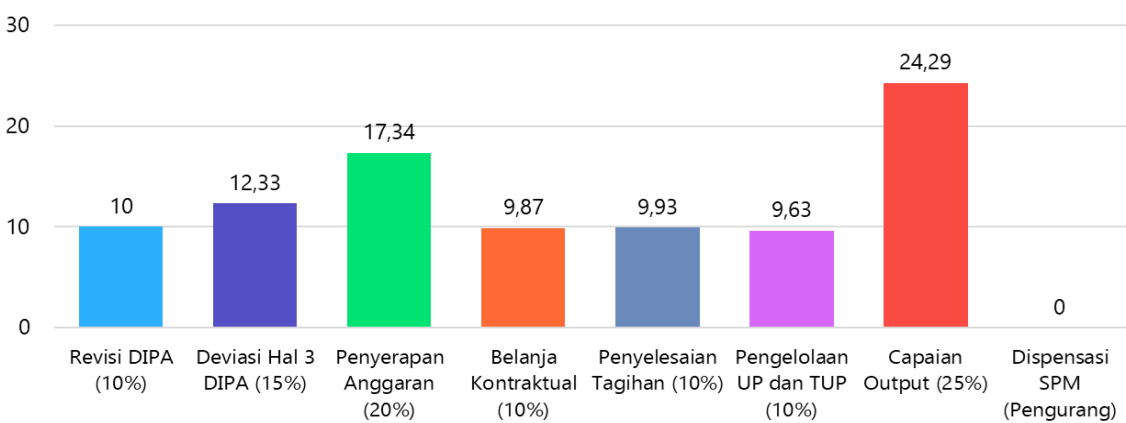
Kinerja Anggaran Ditjen GTK Bulan Oktober 2024



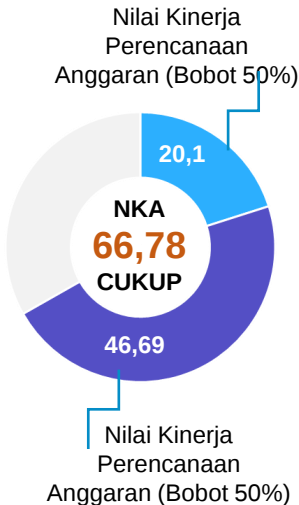
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (40,19)



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (93,37)



Kinerja Anggaran Satker Ditjen GTK Bulan Oktober 2024

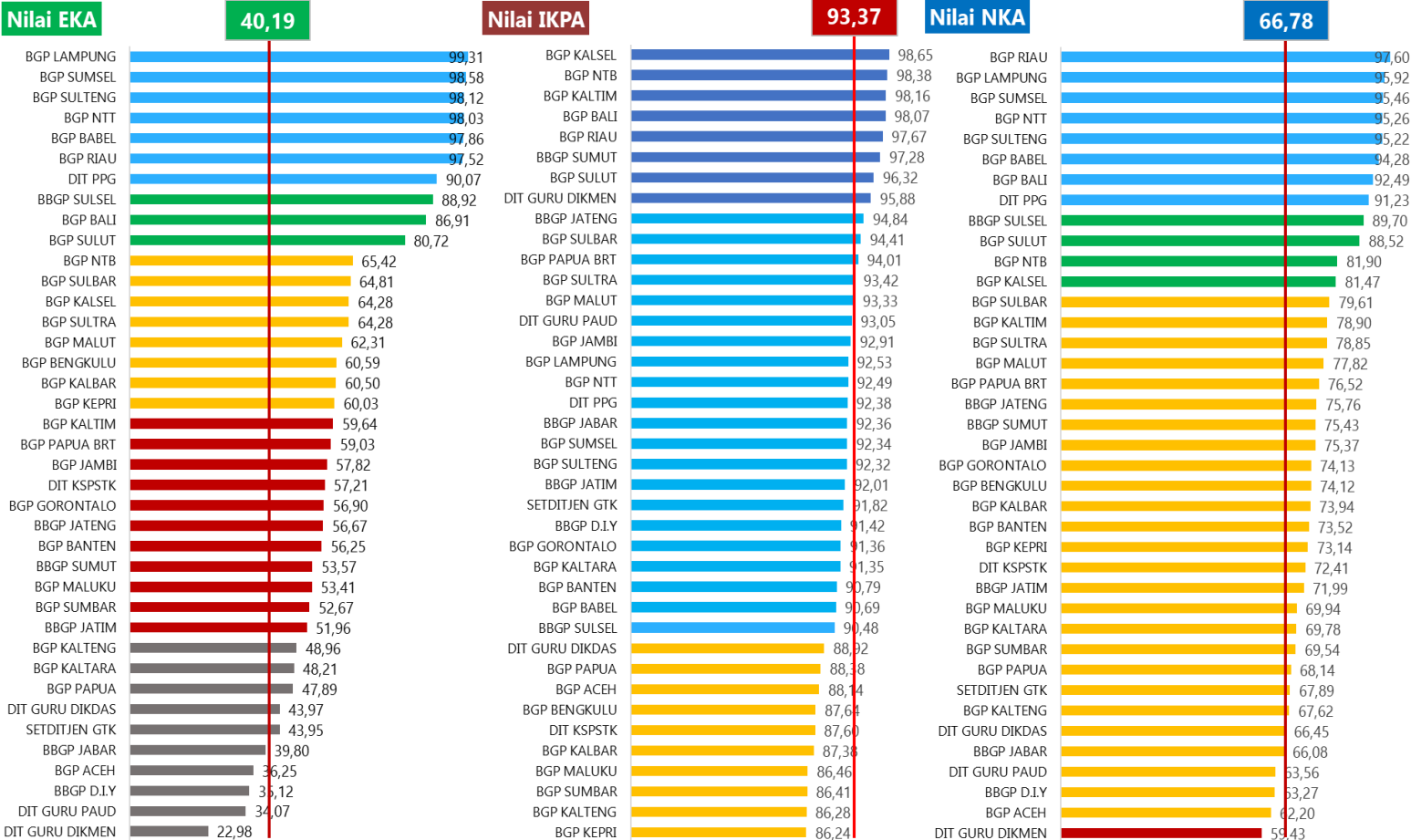


Penilaian IKPA dalam PER-5/PB/2024

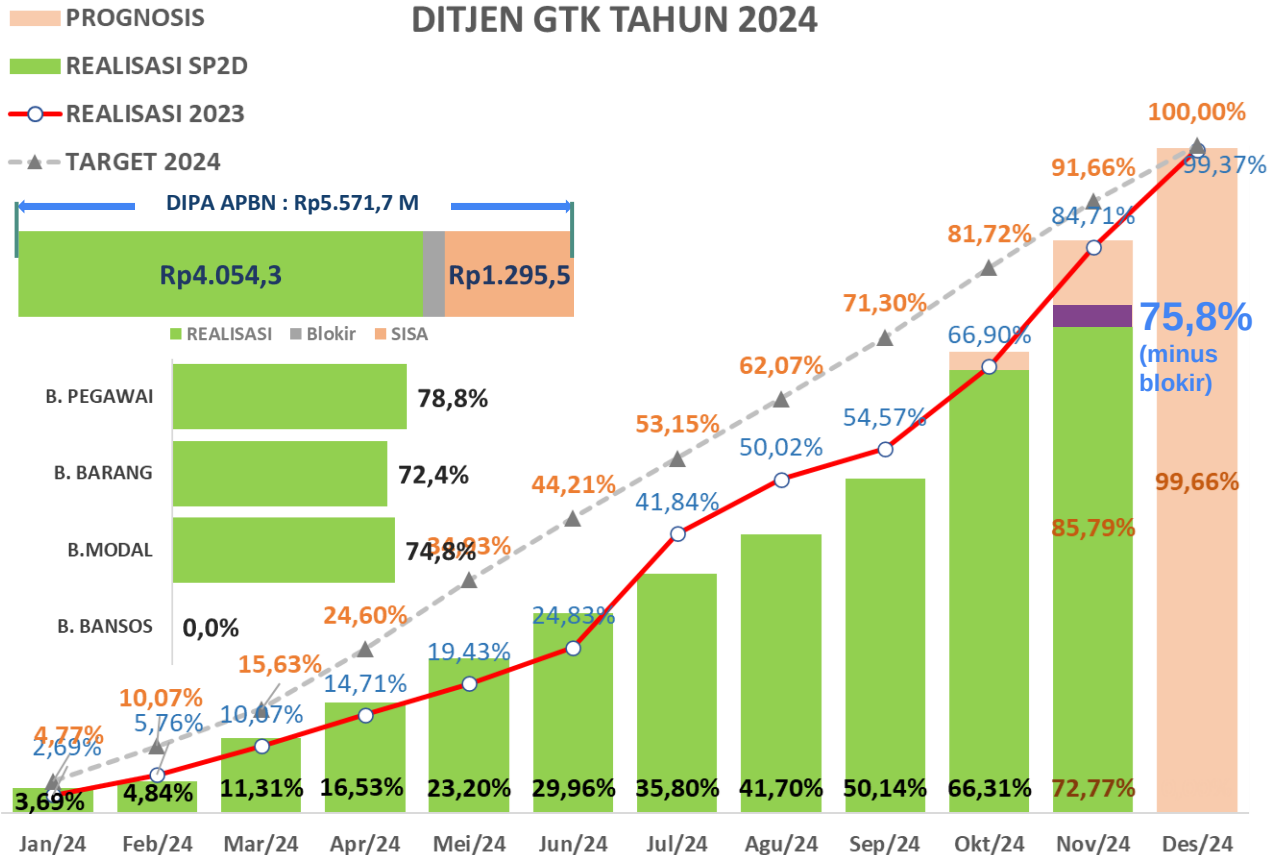
Kategori Nilai IKPA	
nilai IKPA ≥ 95	Sangat Baik
89 ≤ nilai IKPA < 95	Baik
70 ≤ nilai IKPA < 89	Cukup
nilai IKPA < 70	Kurang

Penilaian EKA dalam PMK 62/2023

Kategori Nilai EKA	
> 90 s.d 100	Sangat Baik
> 80 s.d 90	Baik
> 60 s.d 80	Cukup
> 50 s.d 60	Kurang
0 s.d 50	Sangat Kurang



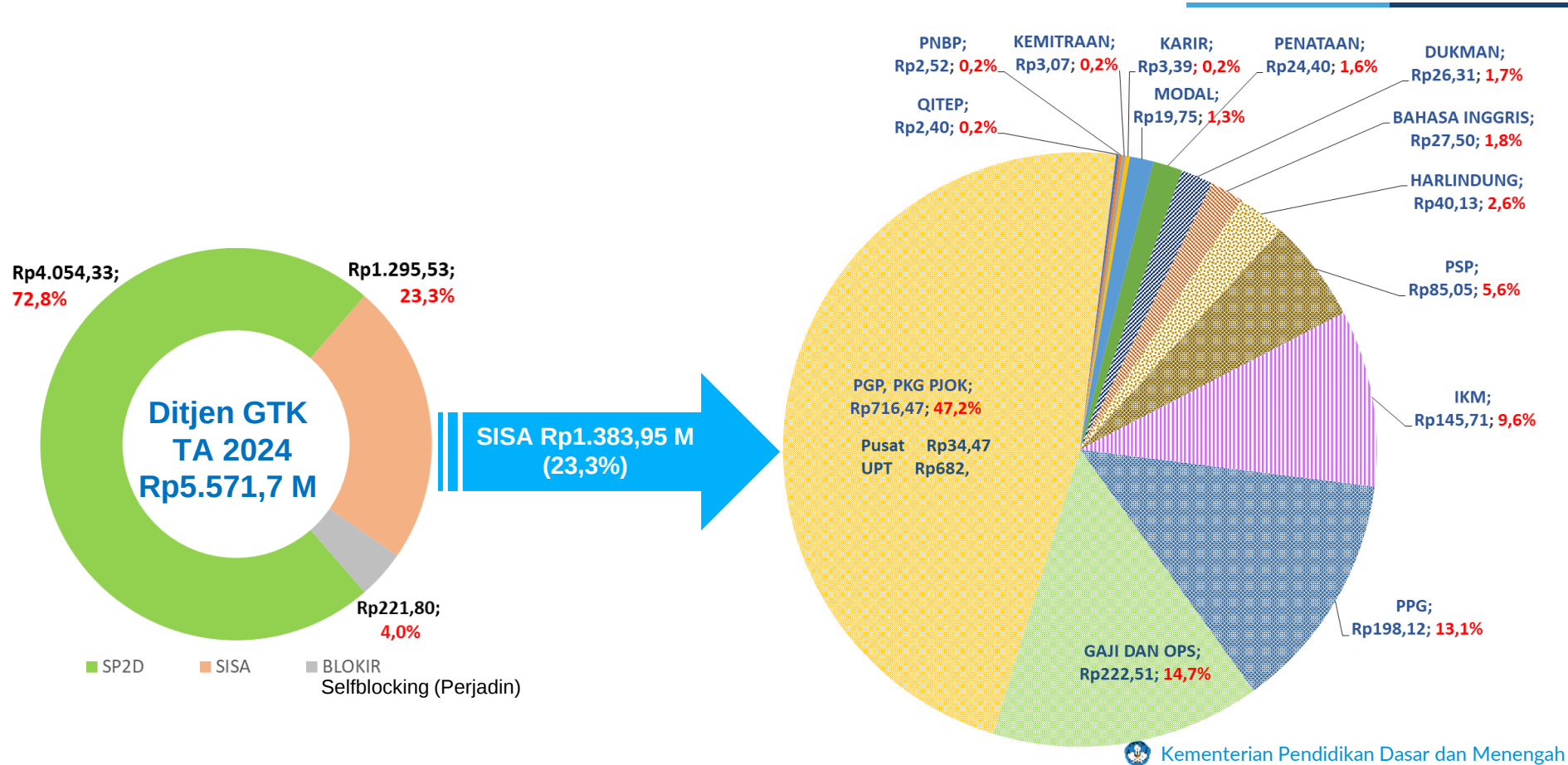
Penyerapan Anggaran TA 2024



BALI	82,6%	17,4%	Rp16.577
SUMUT	82,2%	17,8%	Rp22.357
KALTENG	81,9%	18,1%	Rp6.598
KSPSTK	81,5%	18,5%	Rp73.267
DIY	81,4%	18,6%	Rp26.362
JABAR	81,3%	18,7%	Rp79.331
KALSEL	80,9%	19,1%	Rp10.977
NTB	80,9%	19,1%	Rp12.657
JATIM	80,8%	19,2%	Rp76.434
PAPUA BARAT	80,4%	19,6%	Rp9.546
JATENG	80,3%	19,7%	Rp80.039
SULSEL	79,9%	20,1%	Rp25.565
SULTENG	79,1%	20,9%	Rp9.250
PPG	78,5%	21,5%	Rp201.564
BENGKULU	78,4%	21,6%	Rp7.214
SULTRA	77,6%	22,4%	Rp9.455
MALUT	76,6%	23,4%	Rp6.549
LAMPUNG	76,0%	24,0%	Rp24.719
KALTIM	75,2%	24,8%	Rp14.779
RIAU	74,4%	25,6%	Rp21.935
BANTEN	74,1%	25,9%	Rp25.316
SULUT	74,0%	26,0%	Rp10.441
JAMBI	73,6%	26,4%	Rp11.216
GORONTALO	72,3%	27,7%	Rp9.481
ACEH	72,0%	28,0%	Rp19.463
PAPUA	71,6%	28,4%	Rp24.459
NTT	70,2%	29,8%	Rp29.817
KEPRI	70,2%	29,8%	Rp14.481
DIKMENSUS	69,9%	30,1%	Rp51.424
KALBAR	69,7%	30,3%	Rp20.001
KALTARA	69,1%	30,9%	Rp6.502
PAUD	68,1%	31,9%	Rp47.895
SUMSEL	68,0%	32,0%	Rp31.364
SULBAR	67,9%	32,1%	Rp11.095
MALUKU	67,2%	32,8%	Rp12.024
SUMBAR	66,5%	33,5%	Rp50.514
SEKRETARIAT	65,5%	34,5%	Rp179.686
BABEL	65,3%	34,7%	Rp8.534
DIKDAS	62,2%	37,8%	Rp85.061

23,3% Anggaran GTK yang tersisa

Perkembangan Keterserapan Anggaran Program GTK:



Sisa Dukman pada UPT

B. Gaji (13 M)				B. Rutin (49 M)				B. Swakelola (1,28 M)				B. Modal (12,04 M)			
PAPUA BARAT	93,6%	6,4%	Rp64	SULSEL	87,1%	12,9%	Rp885	SULTRA	100,0%	0,0%	Rp0	ACEH	0,0%	0,0%	Rp0
LAMPUNG	93,1%	6,9%	Rp189	BENGKULU	84,4%	15,6%	Rp241	LAMPUNG	100,0%	0,0%	Rp0	KALTARA	100,0%	0,0%	Rp0
RIAU	92,6%	7,4%	Rp123	JATENG	83,5%	16,5%	Rp1.880	JAMBI	100,0%	0,0%	Rp0	NTT	100,0%	0,0%	Rp0
KALTENG	92,6%	7,4%	Rp122	MALUT	82,5%	17,5%	Rp417	JATENG	100,0%	0,0%	Rp0	KALTIM	100,0%	0,0%	Rp0
DIY	92,6%	7,4%	Rp1.098	SULUT	81,5%	18,5%	Rp645	KALTENG	99,9%	0,1%	Rp0	JAMBI	100,0%	0,0%	Rp0
SULBAR	92,2%	7,8%	Rp134	KALTARA	78,2%	21,8%	Rp498	NTT	99,6%	0,4%	Rp1	JATENG	100,0%	0,0%	Rp0
SUMSEL	92,0%	8,0%	Rp153	GORONTALO	77,2%	22,8%	Rp695	PAPUA BARAT	99,5%	0,5%	Rp1	SULTENG	100,0%	0,0%	Rp0
GORONTALO	91,4%	8,6%	Rp175	SUMUT	76,7%	23,3%	Rp1.264	SULUT	99,4%	0,6%	Rp1	KALSEL	100,0%	0,0%	Rp0
SULUT	91,4%	8,6%	Rp114	SULTRA	76,2%	23,8%	Rp581	GORONTALO	99,1%	0,9%	Rp1	NTB	99,7%	0,3%	Rp3
SULTENG	91,1%	8,9%	Rp193	PAPUA BARAT	75,2%	24,8%	Rp954	BANTEN	99,0%	1,0%	Rp0	SULSEL	99,6%	0,4%	Rp3
BANTEN	91,1%	8,9%	Rp903	KALSEL	74,2%	25,8%	Rp1.213	KEPRI	97,7%	2,3%	Rp6	MALUT	99,1%	0,9%	Rp4
SUMBAR	91,1%	8,9%	Rp227	DIY	74,0%	26,0%	Rp3.424	BALI	97,5%	2,5%	Rp4	SUMUT	99,0%	1,0%	Rp8
JATIM	91,1%	8,9%	Rp1.251	SULTENG	73,4%	26,6%	Rp493	SULTENG	96,4%	3,6%	Rp4	JATIM	98,9%	1,1%	Rp3
BENGKULU	91,0%	9,0%	Rp185	BANTEN	73,3%	26,7%	Rp3.145	BENGKULU	93,8%	6,2%	Rp7	MALUKU	96,1%	3,9%	Rp16
KALTIM	90,8%	9,2%	Rp171	JABAR	72,4%	27,6%	Rp7.087	KALBAR	90,2%	9,8%	Rp10	BENGKULU	94,7%	5,3%	Rp9
BALI	90,3%	9,7%	Rp224	SULBAR	72,0%	28,0%	Rp718	DIY	88,1%	11,9%	Rp11	BABEL	93,3%	6,7%	Rp24
SUMUT	90,2%	9,8%	Rp393	KEPRI	71,7%	28,3%	Rp910	RIAU	83,3%	16,7%	Rp15	PAPUA BARAT	87,2%	12,8%	Rp32
KALSEL	90,0%	10,0%	Rp218	RIAU	68,8%	31,2%	Rp1.077	SULSEL	70,6%	29,4%	Rp37	KALTENG	87,1%	12,9%	Rp83
SULSEL	90,0%	10,0%	Rp462	JAMBI	67,4%	32,6%	Rp669	PAPUA	69,4%	30,6%	Rp62	SUMSEL	78,5%	21,5%	Rp205
KALBAR	89,9%	10,1%	Rp171	JATIM	67,1%	32,9%	Rp6.938	SUMUT	59,2%	40,8%	Rp48	JABAR	71,9%	28,1%	Rp175
ACEH	89,7%	10,3%	Rp244	BALI	67,1%	32,9%	Rp946	KALTIM	58,1%	41,9%	Rp66	BALI	65,7%	34,3%	Rp789
KALTARA	89,2%	10,8%	Rp52	NTB	65,6%	34,4%	Rp1.731	JABAR	54,7%	45,3%	Rp49	SULBAR	65,5%	34,5%	Rp2.540
SULTRA	88,5%	11,5%	Rp294	BABEL	65,1%	34,9%	Rp654	MALUT	52,1%	47,9%	Rp66	GORONTALO	59,0%	41,0%	Rp395
NTB	88,5%	11,5%	Rp232	SUMSEL	64,5%	35,5%	Rp951	SULBAR	47,7%	52,3%	Rp62	RIAU	52,3%	47,7%	Rp1.291
BABEL	88,3%	11,7%	Rp101	KALTIM	63,5%	36,5%	Rp755	NTB	47,2%	52,8%	Rp68	SULUT	43,5%	56,5%	Rp316
NTT	87,1%	12,9%	Rp243	KALTENG	62,3%	37,7%	Rp1.101	SUMBAR	41,9%	58,1%	Rp64	KEPRI	40,0%	60,0%	Rp150
JAMBI	87,0%	13,0%	Rp316	NTT	62,3%	37,7%	Rp947	BABEL	38,6%	61,4%	Rp67	SUMBAR	39,1%	60,9%	Rp1.017
JATENG	86,9%	13,1%	Rp1.140	KALBAR	61,2%	38,8%	Rp908	MALUKU	34,4%	65,6%	Rp105	DIY	36,8%	63,2%	Rp1.039
JABAR	86,7%	13,3%	Rp2.972	MALUKU	60,5%	39,5%	Rp925	KALSEL	24,5%	75,5%	Rp72	LAMPUNG	33,4%	66,6%	Rp1.722
MALUKU	85,4%	14,6%	Rp305	ACEH	59,3%	40,7%	Rp1.216	JATIM	14,0%	86,0%	Rp127	BANTEN	33,3%	66,7%	Rp962
PAPUA	85,2%	14,8%	Rp347	LAMPUNG	58,8%	41,2%	Rp1.391	KALTARA	0,0%	100,0%	Rp123	KALBAR	25,2%	74,8%	Rp502
MALUT	82,5%	17,5%	Rp314	PAPUA	55,0%	45,0%	Rp1.715	SUMSEL	0,0%	100,0%	Rp90	PAPUA	0,0%	100,0%	Rp507
KEPRI	77,9%	22,1%	Rp212	SUMBAR	38,6%	61,4%	Rp1.792	ACEH	0,0%	100,0%	Rp112	SULTRA	0,0%	100,0%	Rp250

Sumber: MONSAKTI per 14 November 2024 (diluar Selfblocking)



Sisa Program pada UPT

PGP, PKG PJOK (548,62 M)

BALI	85,8%	14,2%	Rp11.044
NTB	82,8%	17,2%	Rp7.015
KALTEB	81,3%	18,7%	Rp3.730
JATIM	81,0%	19,0%	Rp53.517
KALSEL	80,9%	19,1%	Rp7.371
DIY	80,5%	19,5%	Rp14.795
LAMPUNG	80,0%	20,0%	Rp15.492
SUMUT	79,8%	20,2%	Rp17.045
JABAR	79,4%	20,6%	Rp60.346
SULSEL	79,0%	21,0%	Rp19.691
JATENG	79,0%	21,0%	Rp67.101
SULTENG	77,2%	22,8%	Rp6.381
PAPUA BARAT	76,5%	23,5%	Rp7.741
RIAU	76,1%	23,9%	Rp14.739
BENGKULU	74,5%	25,5%	Rp4.753
KALTIM	73,1%	26,9%	Rp11.912
PAPUA	72,5%	27,5%	Rp16.984
SULTRA	72,3%	27,7%	Rp7.239
MALUT	72,2%	27,8%	Rp4.462
SULUT	71,9%	28,1%	Rp6.747
BANTEN	71,4%	28,6%	Rp17.382
KALBAR	71,2%	28,8%	Rp15.100
GORONTALO	69,4%	30,6%	Rp6.124
JAMBI	69,3%	30,7%	Rp8.619
ACEH	68,7%	31,3%	Rp15.762
SUMBAR	67,9%	32,1%	Rp39.974
NTT	67,7%	32,3%	Rp25.253
MALUKU	66,4%	33,6%	Rp7.167
KEPRI	66,0%	34,0%	Rp12.294
SUMSEL	65,5%	34,5%	Rp25.158
KALTARA	65,4%	34,6%	Rp4.669
SULBAR	61,8%	38,2%	Rp6.389
BABEL	60,5%	39,5%	Rp6.622

PSP (67,29 M)

KEPRI	98,9%	1,1%	Rp59
PAPUA BARAT	97,2%	2,8%	Rp179
NTB	97,1%	2,9%	Rp388
SUMUT	93,9%	6,1%	Rp1.541
SULTRA	93,2%	6,8%	Rp609
SULBAR	93,1%	6,9%	Rp290
KALTARA	91,9%	8,1%	Rp236
JABAR	91,0%	9,0%	Rp5.463
KALTIM	90,9%	9,1%	Rp706
JAMBI	90,6%	9,4%	Rp589
SULTENG	89,7%	10,3%	Rp916
JATENG	89,0%	11,0%	Rp6.030
KALTEB	88,9%	11,1%	Rp940
PAPUA	88,8%	11,2%	Rp1.267
ACEH	86,1%	13,9%	Rp1.679
DIY	86,1%	13,9%	Rp4.083
KALSEL	86,1%	13,9%	Rp1.149
MALUT	86,0%	14,0%	Rp755
JATIM	86,0%	14,0%	Rp10.599
BABEL	84,4%	15,6%	Rp488
BENGKULU	84,1%	15,9%	Rp851
SULSEL	84,1%	15,9%	Rp2.909
BANTEN	84,0%	16,0%	Rp1.834
NTT	84,0%	16,0%	Rp2.232
SUMSEL	82,7%	17,3%	Rp2.574
GORONTALO	80,5%	19,5%	Rp1.227
BALI	80,3%	19,7%	Rp1.313
SULUT	77,7%	22,3%	Rp1.777
RIAU	77,0%	23,0%	Rp2.903
LAMPUNG	75,3%	24,7%	Rp3.079
MALUKU	73,7%	26,3%	Rp2.094
SUMBAR	71,8%	28,2%	Rp4.279
KALBAR	64,9%	35,1%	Rp2.253

IKM, PNBP (23,54 M)

JABAR	95,6%	4,4%	Rp321
NTT	94,3%	5,7%	Rp94
PAPUA BARAT	85,6%	14,4%	Rp311
MALUT	83,1%	16,9%	Rp168
BALI	82,7%	17,3%	Rp91
BENGKULU	82,1%	17,9%	Rp918
ACEH	79,1%	20,9%	Rp215
JAMBI	77,4%	22,6%	Rp165
KALTENG	76,5%	23,5%	Rp357
KALBAR	75,4%	24,6%	Rp245
SULTRA	75,0%	25,0%	Rp302
KALSEL	68,9%	31,1%	Rp167
BANTEN	68,7%	31,3%	Rp197
DIY	68,6%	31,4%	Rp511
SULSEL	65,9%	34,1%	Rp352
BABEL	62,2%	37,8%	Rp218
SUMUT	61,5%	38,5%	Rp1.126
SULUT	61,4%	38,6%	Rp664
JATENG	60,8%	39,2%	Rp2.521
RIAU	60,7%	39,3%	Rp500
KALTIM	59,2%	40,8%	Rp772
GORONTALO	58,4%	41,6%	Rp316
SULTENG	54,1%	45,9%	Rp1.057
KEPRI	52,5%	47,5%	Rp336
MALUKU	51,1%	48,9%	Rp604
LAMPUNG	48,6%	51,4%	Rp1.175
PAPUA	47,1%	52,9%	Rp2.481
SULBAR	46,1%	53,9%	Rp536
SUMSEL	41,7%	58,3%	Rp1.219
KALTARA	25,5%	74,5%	Rp313
NTB	21,9%	78,1%	Rp2.605
SUMBAR	8,5%	91,5%	Rp1.029
JATIM	6,5%	93,5%	Rp1.651

B. Inggris (27,50 M)

PAPUA BARAT	86,9%	13,1%	Rp256
SULUT	82,1%	17,9%	Rp174
KALTENG	79,1%	20,9%	Rp258
KEPRI	73,1%	26,9%	Rp503
KALSEL	70,1%	29,9%	Rp776
SULTRA	69,7%	30,3%	Rp170
JATENG	66,7%	33,3%	Rp1.364
JAMBI	63,4%	36,6%	Rp848
SUMUT	63,1%	36,9%	Rp922
BABEL	62,6%	37,4%	Rp349
JABAR	61,6%	38,4%	Rp1.078
ACEH	59,8%	40,2%	Rp223
KALTIM	59,5%	40,5%	Rp394
SUMSEL	59,3%	40,7%	Rp1.003
MALUT	55,2%	44,8%	Rp353
SULBAR	53,9%	46,1%	Rp417
DIY	53,7%	46,3%	Rp823
SULTENG	46,8%	53,2%	Rp195
KALTARA	44,5%	55,5%	Rp600
BANTEN	43,1%	56,9%	Rp883
RIAU	41,2%	58,8%	Rp1.278
GORONTALO	41,1%	58,9%	Rp538
SULSEL	40,6%	59,4%	Rp1.216
KALBAR	38,4%	61,6%	Rp810
BENGKULU	37,8%	62,2%	Rp241
NTB	33,8%	66,2%	Rp609
MALUKU	32,6%	67,4%	Rp798
NTT	28,4%	71,6%	Rp1.037
JATIM	26,5%	73,5%	Rp2.338
LAMPUNG	22,8%	77,2%	Rp1.662
BALI	22,0%	78,0%	Rp2.164
SUMBAR	21,2%	78,8%	Rp2.121
PAPUA	20,1%	79,9%	Rp1.096



Sisa anggaran pada Pusat

Program Pusat

KARIR	PAUD	96,6% 3,4%	Rp65
	KSPSTK	87,3% 12,7%	Rp659
	DIKMENSUS	80,2% 19,8%	Rp1.439
	DIKDAS	73,8% 26,2%	Rp1.226
PENATAAN	KSPSTK	91,5% 8,5%	Rp648
	DIKDAS	75,0% 25,0%	Rp7.794
	PAUD	74,0% 26,0%	Rp7.915
	DIKMENSUS	64,6% 35,4%	Rp8.045
KEMITRAAN	PAUD	97,8% 2,2%	Rp366
	DIKMENSUS	93,2% 6,8%	Rp1.678
	DIKDAS	76,4% 23,6%	Rp1.024

Program Pusat

PSP	KSPSTK	70,7% 29,3%	Rp17.755
	KSPSTK	81,8% 18,2%	Rp34.473
	PPG	78,4% 21,6%	Rp198.124
PPG	PPG	78,4% 21,6%	Rp198.124
	DIKDAS	44,1% 55,9%	Rp60.010
	DIKMENSUS	38,3% 61,7%	Rp31.822
PEMBELAJARAN	PAUD	38,0% 62,0%	Rp32.862
	DIKMENSUS	27,0% 73,0%	Rp5.090
	PAUD	25,0% 75,0%	Rp4.966
HARLINDUNG	DIKDAS	15,3% 84,7%	Rp12.082
	KSPSTK	11,7% 88,3%	Rp17.993

Program Dukman Pusat

GDNG	SEKRETARIAT	45,4% 54,6%	Rp4.826
	KSPSTK	100,0% 0,0%	Rp0
	SEKRETARIAT	94,1% 5,9%	Rp2.088
MODAL SARANA	PPG	87,6% 12,4%	Rp31
	DIKDAS	49,3% 50,7%	Rp233
	PAUD	38,4% 61,6%	Rp154
	DIKMENSUS	7,3% 92,7%	Rp377
OPERASIONAL	PAUD	82,6% 17,4%	Rp1.126
	KSPSTK	80,9% 19,1%	Rp1.314
	DIKDAS	70,7% 29,3%	Rp2.285
	DIKMENSUS	66,7% 33,3%	Rp2.472
	PPG	56,4% 43,6%	Rp2.744
	SEKRETARIAT	30,2% 69,8%	Rp94.676

Sumber: MONSAKTI per 14 November 2024 (diluar Selfblocking)



Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah

04 Dukungan Quick Wins TA 2024

Dukungan dalam Quick Wins

Dukungan program GTK sejak 21 Okt – Des 2024:

No	Kegiatan	Sasaran	Batas Waktu	PIC	Penjelasan
1	Peningkatan kompetensi pada literasi dan numerasi:				
	a. Bimtek PKG BK dalam Rangka Menciptakan Iklim Sekolah Aman, Nyaman, dan Gembira	1.021 org	Nov – Des 2024	Dit. Dikmen-Diksus	Guru BK yang dilatih dengan materi pembelajaran/modul parenting, penanganan kekerasan, dan perlindungan PTK. Pola diklat luring 40 JP.
	b. Bimtek PKG Kelas dalam Penanganan Kekerasan melalui Layanan BK	1.772 org	Nov – Des 2024	Dit. PAUD-Dikmas	Guru kelas yang dilatih agar memiliki keterampilan BK. Pola diklat luring 40 JP.
	c. Bimtek PKG MIPA/PISA	2.427 org	Nov – Des 2024	Dit. Dikdas	Guru MIPA yang diberikan pengembangan kompetensi berkelanjutan melalui pelatihan dan pendampingan literasi, numerasi dan sains. Pola diklat luring 40 JP. Sasarannya pada sekolah sample PISA yang telah ditetapkan oleh BSKAP.
2	Sistem pengelolaan kinerja guru dan KS terintegrasi dengan SIASN BKN	1.762.648 ASN Guru ASN	Des 2024	• Dit. PAUD • Dit. Dikdas • Dit. Dikmen • Dit. KSPSTK • UPT	• Penyesuaian platform dari PMM menjadi Rumah Pendidikan. • Penyesuaian regulasi. • Sosialisasi dan workshop narasumber Propinsi. • Desiminasi guru tingkat kab/kota.

A Peningkatan Kompetensi Guru BK

Pada Asesmen Nasional 2022 menunjukkan peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual, hukuman fisik, dan mengalami perundungan.

Tidak semua guru kelas memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus di bidang bimbingan dan konseling, sehingga berdampak pada layanan BK yang tidak optimal.

Kemampuan bimbingan konseling bagi guru SD sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh dan untuk memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan belajar yang optimal sesuai dengan potensi dan kebutuhannya.

Profil Guru BK

Permendikbud No. 111/2014: BK pada Dikdas dan Dikmen

Penyelenggaraan BK pada SD/MI atau yang sederajat dilakukan oleh Konselor atau guru BK.

Jumlah guru BK nasional: **65.633**

No	Jenjang	SEKOLAH NEGERI				SEKOLAH SWASTA				TOTAL			
		ABK	ASN	Non ASN	Kurang ASN	ABK	ASN	Non ASN	Kurang ASN	ABK	ASN	Non ASN	Kurang ASN
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	51.377	23.687	5.321	27.823	24.512	99	5.345	24.413	75.889	23.786	10.666	52.236
3	SMA	23.956	11.431	2.021	12.525	11.126	62	3.297	11.064	35.082	11.493	5.918	23.589
4	SMK	16.509	7.048	1518	9.461	21.563	36	4.975	21.527	38.072	7.084	6.493	30.988
5	SLB	36	36	36	(2)	2	2	117	(117)	38	38	155	0

Kebutuhan Guru BK

149.081

Guru BK ASN

42.401

Guru BK Non ASN

23.232

Kekurangan Guru BK

106.813

Sasaran PKG BK:

- 1) Bimtek Peningkatan Kompetensi **Guru Kelas** dalam Penanganan Kekerasan melalui Layanan BK;
- 2) Bimtek Peningkatan Kompetensi **Guru BK** dalam Rangka Menciptakan Iklim Sekolah Aman



Peningkatan Kompetensi Guru MIPA Berbasis Sains dan Teknologi

Data Rapor Pendidikan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kompetensi literasi, numerasi dan sains peserta didik Indonesia memperlihatkan hasil yang belum memuaskan tercatat bahwa :

- a. satu dari dua peserta didik jenjang SD memiliki kecakapan literasi jauh di bawah kompetensi minimum.
- b. dua dari tiga peserta didik SD yang kecakapan numerasinya jauh di bawah kompetensi minimum dalam berpikir logis-sistematis mulai dari pemahaman, penerapan, dan penalaran menggunakan matematika dalam berbagai konteks.
- c. Hasil PISA 2022 kemampuan sains pelajar Indonesia baru pada tingkat mampu menggunakan ilmu pengetahuan dasar untuk mengidentifikasi fenomena ilmiah sederhana

Data Rapor Pendidikan tahun 2023 menunjukkan kecakapan literasi dan numerasi peserta didik yang tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

Tujuan Bimtek Pengembangan Kompetensi Guru MIPA Berbasis Sains dan Teknologi

1. Memperkuat kompetensi literasi , numerasi dan sains.

Setelah mengikuti PKG Guru MIPA diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, menguatkan keterampilan, dan menjalankan program penguatan literasi, numerasi, dan sains secara utuh dan menyeluruh di satuan pendidikan masing-masing.

2. Mendorong kolaborasi dan pertukaran pengalaman agar guru dapat berperan sebagai agen perubahan

Kegiatan PKG Guru MIPA didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan melibatkan partisipasi guru. Peserta akan lebih banyak melakukan eksplorasi konsep dan mendapatkan pemahaman melalui aktivitas dalam pelatihan dan pendampingan. Mereka juga dapat saling bertukar pengalaman dan praktik baik serta mengadaptasi praktik tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan pendampingan meningkatkan kemampuan guru untuk menerapkan materi pelatihan dalam bimbingan dan supervisi fasilitator.

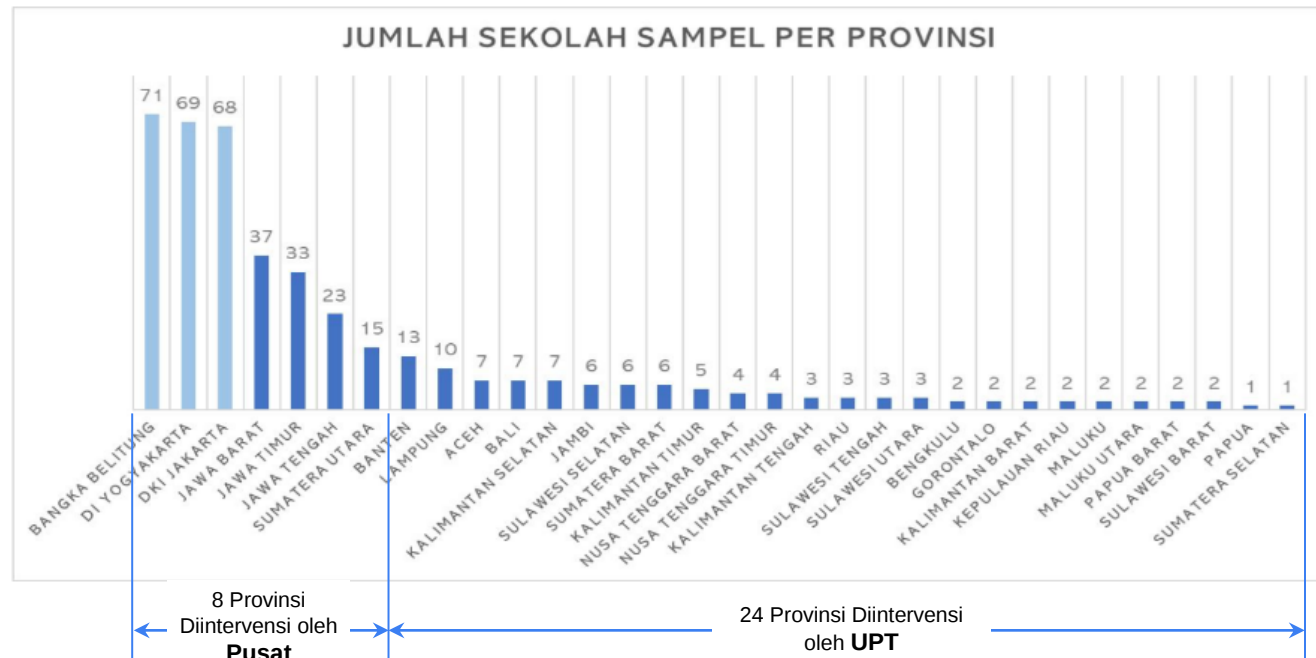
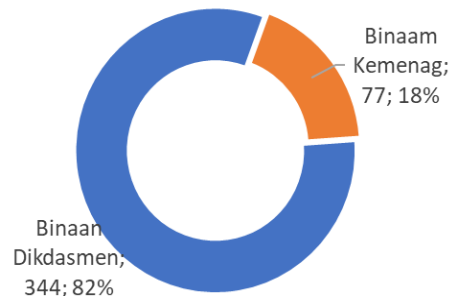
3. Mendorong keberlanjutan program melalui fasilitasi penerapan dan pengimbasan materi.

Kegiatan PKG Guru MIPA diharapkan menumbuhkan inisiatif peserta untuk menerapkan dan mengimbasan praktik baik secara berkelanjutan dengan melibatkan komunitas belajar.

Sekolah Sampel Studi Utama PISA Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh BSKAP dan Sebaran jumlah guru yang akan di Bimtek

35

421 Sekolah Sampel PISA 2025





Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah

05 Kebijakan TA 2025

“Pendidikan Bermutu untuk Semua”

Pembukaan UUD 1945

...untuk **memajukan** kesejahteraan umum, **mencerdaskan** kehidupan bangsa...

Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 31 ayat 1 Setiap warga negara **berhak** mendapatkan pendidikan

Pasal 31 ayat 3 ...meningkatkan **keimanan** dan **ketakwaan** serta **akhlak** mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,...

UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta **peradaban bangsa yang bermartabat** dalam rangka **mencerdaskan** kehidupan bangsa,...

Pasal 5 ayat 1 Setiap warga negara mempunyai **hak yang sama** untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 8 Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Cuplikan peraturan lain yang terkait:

UU No. 8/2016 tentang
Penyandang Disabilitas

Perpres No. 87/2017 tentang
Penguatan Pendidikan Karakter

UU No. 59/2024 tentang
RPJPN 2025-2045

ASTA CITA Kabinet Merah Putih

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Bangsa Cerdas & Maju

Pendidikan Bermutu

Pendidikan untuk Semua

Sarana & Prasarana
Memadai



Pendidik dan Tendik
Kompeten & Sejahtera



Lingkungan Sosial-Budaya
Mendukung



Pembelajaran
Adaptif dan Bermakna



Ketersediaan Layanan
Merata



Pembiayaan Pendidikan
Afirmatif



Layanan Pendidikan
Inklusif



Pengembangan
Talenta Unggul

PROGRAM PRIORITAS KEMENDIKDASMEN



1. Penguatan Pendidikan Karakter

- Pelatihan Bimbingan Konseling dan pendidikan nilai untuk guru kelas
- Peningkatan kompetensi guru BK dan guru agama
- Penanaman Karakter 7 Kebiasaan Anak Indonesia
- Pengangkatan guru BK
- Makan siang bergizi

2. Wajib Belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan

- Afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat: rumah belajar, PAUD, Pendidikan Jarak Jauh
- Memfasilitasi Relawan Mengajar

3. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru

- Peningkatan kualifikasi D4/S1
- Pelatihan kompetensi guru
- Peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi

4. Penguatan Pendidikan unggul, literasi, numerasi dan sains teknologi

- Pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini
- Pendirian sekolah unggul dan pengembangan sekolah unggul
- Penguatan Pendidikan Vokasi, kejuruan dan pelatihan

5. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan

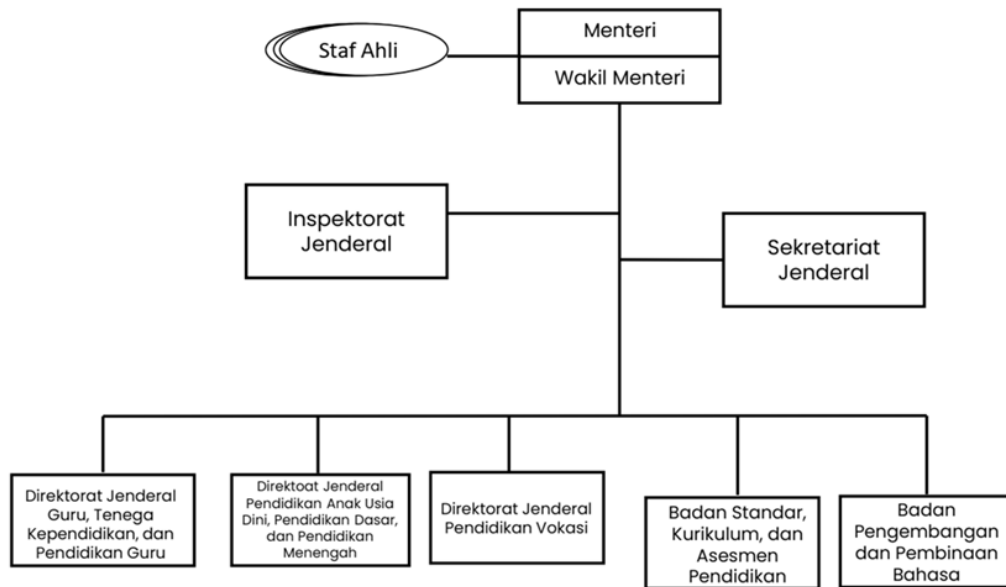
- Renovasi Sekolah

6. Pembangunan Bahasa dan Sastra

- Pemartabatan bahasa negara-
- Pelindungan bahasa daerah
- Penginternasionalan Bahasa Indonesia
- Peningkatan literasi

OTK KEMENDIKDASMEN

Berdasarkan Perpres No. 188/2024



Keterangan Nomenklatur Staf Ahli:

1. Staf Ahli Bidang Regulasi
2. Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta
3. Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan

Tugas

menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

Fungsi

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru, dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru;
- c. pelaksanaan fasilitasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan vokasi;
- d. penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan vokasi;
- e. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan vokasi;
- f. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
- g. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
- i. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- j. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- l. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Tugas dan Fungsi Ditjen GTK-PG

Berdasarkan Perpres No. 188/2024

TUGAS:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru.

FUNGSI:

- a. perumusan kebijakan di bidang **pembinaan** guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta **pendidikan profesi guru**;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang **pembelajaran, pengembangan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi nonvokasional** guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, **pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi**, dan **fasilitasi pendidikan profesi guru**;
- d. pelaksanaan **pengembangan talenta guru berbasis sains, teknologi, teknik, dan matematika**;
- e. pelaksanaan kebijakan di bidang **standar dan perencanaan kebutuhan** guru, dan **penjaminan mutu** pada pendidikan profesi guru;
- f. pelaksanaan **fasilitasi** di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- g. penyusunan **norma, prosedur, dan kriteria** di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- h. pemberian **bimbingan teknis dan supervisi** di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan;
- i. pelaksanaan **pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan** di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru;
- j. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

**Rincian OTK Ditjen GTK-PG akan ditetapkan melalui Permendasmen dengan persetujuan
KemenPAN-RB**



06 Isu-isu Lainnya

Isu Pembatasan Perjalanan Dinas TA 2024



Nomor : S-1023/MK.02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas
Kementerian/Lembaga TA 2024

Yth. 1. Para Menteri Kabinet Merah Putih
2. Jaksa Agung RI
3. Kepala Kepolisian RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA TA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektifitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.
2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan penghematan minimal 50% (lima puluh persen) dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.
3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.
4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:
 - a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
 - b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedudukan besar/atas.
5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.
6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi sebagaimana dimaksud pada angka 6.

(dalam ribu rupiah)

Kementerian/Lembaga/Unit	Pagu Alokasi	Blokir Alokasi	Realisasi Belanja	Sisa Pagu	Target Penghematan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)-(3)-(4)	(6) = 50% x (5)
023 KEMENDIKBUDRISTEK	4.960.059.590	96.306.088	3.746.202.454	1.117.551.048	558.775.524
023 01 Sekretariat Jenderal	725.874.984	21.086.348	548.895.401	155.893.235	77.946.618
023 02 Inspektorat Jenderal	35.760.877	-	28.321.565	7.439.312	3.719.656
023 03 Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	967.848.260	30.067.137	795.714.009	142.067.114	71.033.557
023 11 Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	242.383.127	21.381.408	179.214.843	41.786.876	20.893.438
023 13 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	201.985.662	4.105.056	141.208.058	56.672.548	28.336.274
023 15 Ditjen Kebudayaan	210.130.650	11.629.952	135.715.361	62.785.337	31.392.668
023 16 Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	1.878.226.842	-	1.434.563.597	443.663.245	221.831.622
023 17 Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	266.641.218	5.790.221	144.875.085	115.975.912	57.987.956
023 18 Ditjen Pendidikan Vokasi	431.207.970	2.245.966	337.694.535	91.267.469	45.633.735

- Berdasarkan perhitungan Kemenkeu, sisa akun perjadin (524xxx) Ditjen GTK yang tersisa Rp443M dan **efisiensi/penghematan 50% menjadi Rp221M**.
- Selanjutnya dilakukan proses *selfblocking* di Kanwil DJPB.
- *Selfblocking* berpotensi **blokir hingga akhir tahun**.
- Ditjen GTK telah berkoordinasi dengan Satker dalam mengambil **langkah-langkah strategi** dalam menyikapi nilai penghematan.
- Ditjen GTK **berupaya mengajukan dispensasi** pengurangan penghematan perjadin melalui Sekretaris Jenderal.

Mengapa perlu ada Formasi

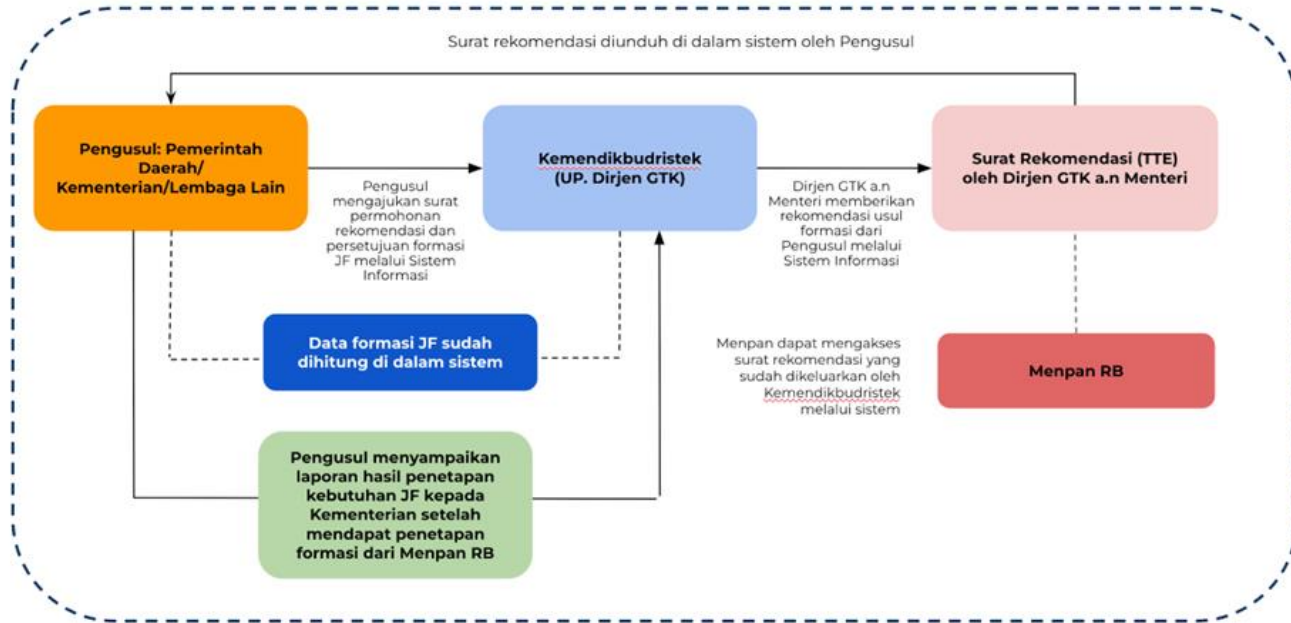
Keppendikbudristek No 234 tentang Pedoman Perhitungan Formasi JF Guru, JF Pengawas Sekolah, JF Penilik, dan JF Pamong Belajar

Kelulusan Uji Kompetensi hingga Tahap 2 tahun 2024

- JF Guru : **94,992 orang**,
- JF Pamong Belajar : 43 orang
- JF Penilik : 121 orang

- JF yang sudah lulus uji kompetensi harus segera proses untuk perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang nya karena sertifikasi kelulusan mempunyai kadaluarsa
- Perlu ada penetapan Formasi dari kemenpan berdasarkan rekomendasi formasi dari Kementerian PDM
- Permintaan rekomendasi tersebut dilakukan melalui sistem informasi formasi

Pengajuan Rekomendasi melalui Sistem Informasi



Update Rekomendasi Formasi JF

Masih banyak daerah yang belum mengajukan atau belum selesai proses pengajuan rekomendasi formasi JF Guru JF Pamong Belajar dan JF Penilik

No	Propinsi	Jumlah Kab/Kota					Dokumen Rekomendasi Sudah Terbit
		Total	Belum Mengajukan	Proses Verifikasi	Direvisi	Proses TTE	
1	ACEH	24	18	3	1	2	
2	BALI	10	6	2		2	
3	BANTEN	9	8				1
4	BENGKULU	11	6		1	4	
5	D.I. YOGYAKARTA	7	6				1
6	GORONTALO	7	7				
7	JAMBI	12	10	1			1
8	JAWA BARAT	28	16	3	2	3	4
9	JAWA TENGAH	36	22	1	5	4	4
10	JAWA TIMUR	39	24	6	1	4	4
11	KALIMANTAN BARAT	15	14	1			
12	KALIMANTAN SELATAN	14	14				
13	KALIMANTAN TENGAH	15	13			2	
14	KALIMANTAN TIMUR	11	9			1	1
15	KALIMANTAN UTARA	6	5				1
16	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	8	5	2			1
17	KEPULAUAN RIAU	8	6	2			
18	LAMPUNG	16	13		1	2	

No	Propinsi	Jumlah Kab/Kota					Dokumen Rekomendasi Sudah Terbit
		Total	Belum Mengajukan	Proses Verifikasi	Direvisi	Proses TTE	
19	MALUKU	12	11				1
20	MALUKU UTARA	11	11				
21	NUSA TENGGARA BARAT	11	9				2
22	NUSA TENGGARA TIMUR	23	23				
23	PAPUA	10	9	1			
24	PAPUA BARAT	15	10	4		1	
25	PAPUA PEGUNUNGAN	9	7		1		1
26	PAPUA SELATAN	5	5				
27	PAPUA TENGAH	9	8		1		
28	RIAU	13	9			1	3
29	SULAWESI BARAT	7	2	1	2	2	
30	SULAWESI SELATAN	25	25				
31	SULAWESI TENGAH	14	14				
32	SULAWESI TENGGARA	18	18				
33	SULAWESI UTARA	16	14		1		1
34	SUMATERA BARAT	20	3	5	3	8	1
35	SUMATERA SELATAN	18	12	1		2	3
36	SUMATERA UTARA	34	28	1		2	3

ARAHAN RAPIM B – NOVEMBER 2024

1. Perpres OTK Kemendikdasmen telah terbit, Ditjen GTK berubah menjadi **Ditjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTK-PG)**. Saat ini kita masih menunggu penetapan Permendasmen terkait: OTK Ditjen GTK-PG dan OTK UPT;
2. Mendikdasmen telah membuat program *Quick Wins* yang harus kita laksanakan hingga akhir Desember 2024, **segala upaya usaha harus** kita kerahkan untuk pencapaian target;
3. Saat ini kita menghadapi adanya kebijakan pembatasan perjadin. Tim Setditjen telah memberikan Langkah strategis yang dapat ditempuh menyiasati kebijakan tersebut. Namun kita **harus memprioritaskan** kegiatan yang telah ditetapkan dalam program *Quick Wins* dengan berbagai strategi dan inovasi;
4. Bangun **sinergitas antara pengelola Keuangan dengan tim Perencana** satker dalam melaksanakan/ merealisasikan anggaran maupun kegiatan;
5. Kepala satker juga harus berkomitmen untuk **menyerap anggaran di atas 99%**;
6. Memperhatikan/ memedomani Langkah-Langkah Akhir Tahun Anggaran (LLAT) yang telah ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan.
7. Tahun 2025 Ditjen GTK fokus pada: Penuntasan Sertifikasi, Peningkatan Kesejahteraan Guru, Peningkatan Kompetensi Guru Kelas, BK, MIPA/PISA, Pendidikan Matematika sejak PAUD, dan Diklat Berjenjang PAUD.



Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah



Terima Kasih